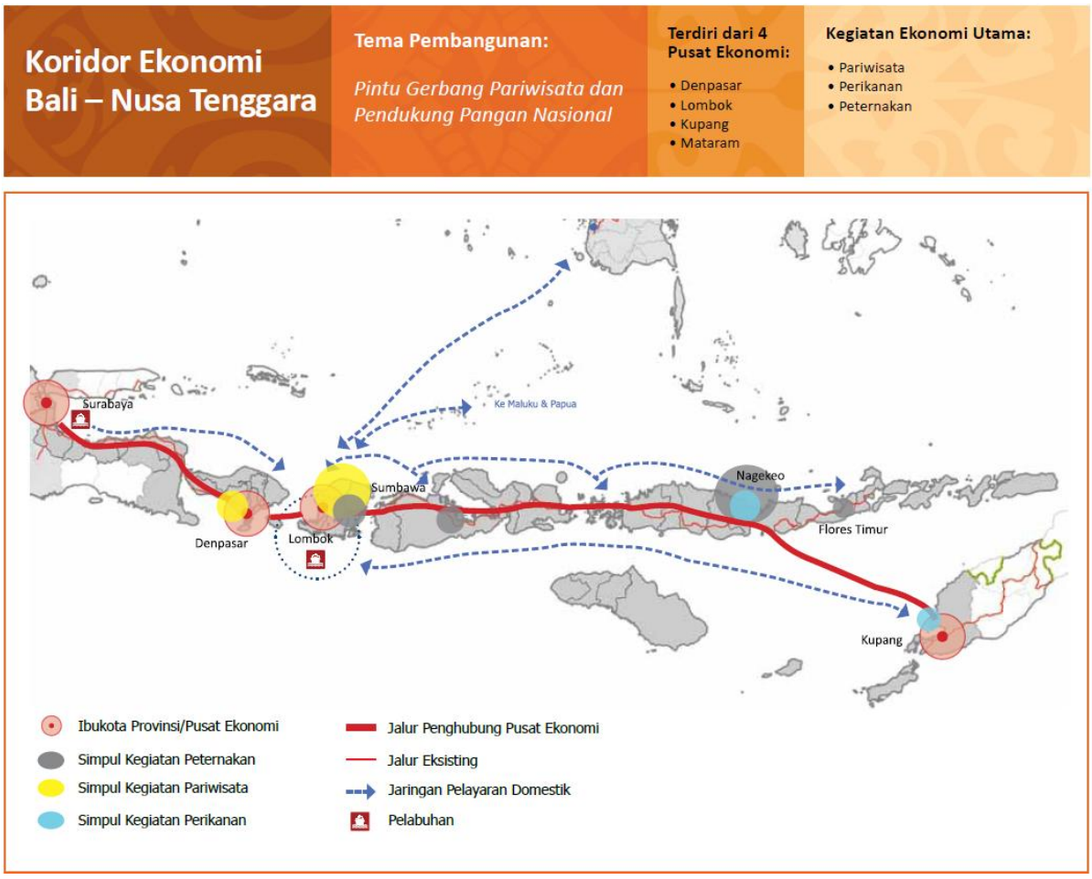

F. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

1. Overview Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara mempunyai tema menjadi Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di koridor ini yang mana 17 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan serta memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi yaitu sebesar IDR 17,7 juta per kapita (antara kabupaten/kota terkaya dan termiskin di dalam koridor ini). Namun demikian, koridor ini memiliki kondisi sosial yang cukup baik, sebagaimana terlihat dari tingginya tingkat harapan hidup sebesar 63 tahun, tingkat melek huruf sebesar 80 persen serta tingkat PDRB per kapita sebesar IDR 14,9 juta yang lebih tinggi dibandingkan PDB per kapita nasional sebesar IDR 13,7 juta.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh koridor ini, antara lain populasi penduduk yang tidak merata, tingkat investasi yang rendah serta ketersediaan infrastruktur dasar yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang akan difokuskan pada 3 (tiga) kegiatan ekonomi utama, yaitu: pariwisata, perikanan dan peternakan.

Gambar berikut menunjukkan kontribusi kegiatan pariwisata, perikanan dan peternakan yang tergambarkan dalam sektor perdagangan, hotel, restoran dan pertanian terhadap perekonomian di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gambar 3.F.1
PDRB Provinsi Bali, NTB, NTT berdasarkan Sektor (2008)

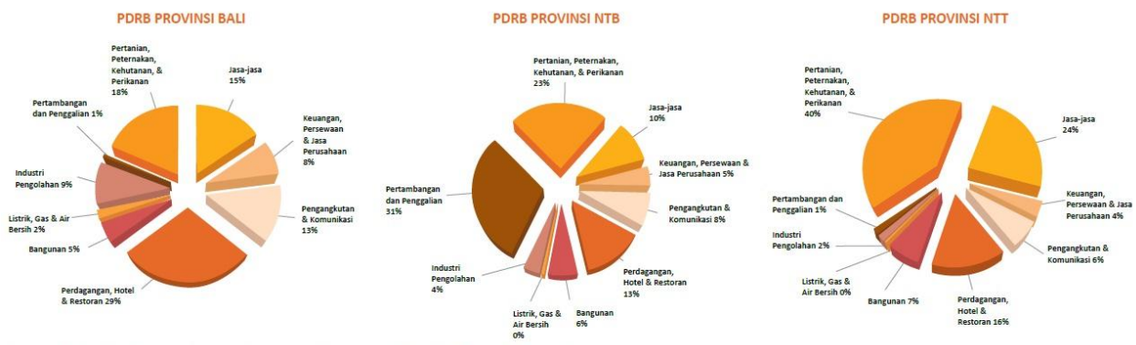

Sumber: Bahan Presentasi "Konsep Pembangunan Kepariwisataan Koridor Ekonomi Bali-NTB-NTT", Kemenbudpar, 2011

Dari gambar di atas diketahui bahwa kegiatan pariwisata, perikanan dan peternakan berkontribusi besar terhadap PDRB masing-masing provinsi yaitu sebesar 47 persen (Bali), 36 persen (NTB) dan 56 persen (NTT). Dengan rata-rata peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar 11 persen per tahun selama lima tahun terakhir, ketiga kegiatan tersebut dapat berpotensi untuk menjadi mesin penggerak perekonomian di Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara.

a. Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara difokuskan pada 9 Destinasi Pariwisata Nasional. Sistem industri jasa memiliki peranan strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan nasional. Selain itu, juga memberikan kontribusi dalam perolehan devisa negara serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Peningkatan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2010 berdampak pada nilai kontribusi pariwisata yaitu sebesar USD 7,6 miliar dengan kenaikan dari tahun 2008 sebesar USD 7,3 miliar. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas) 2011–2025 menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional sampai dengan 2025, menargetkan kunjungan wisman mencapai 20 juta orang per tahun (skenario positif).

Gambar 3.F.2
Pariwisata di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara Penting Bagi Perekonomian Indonesia

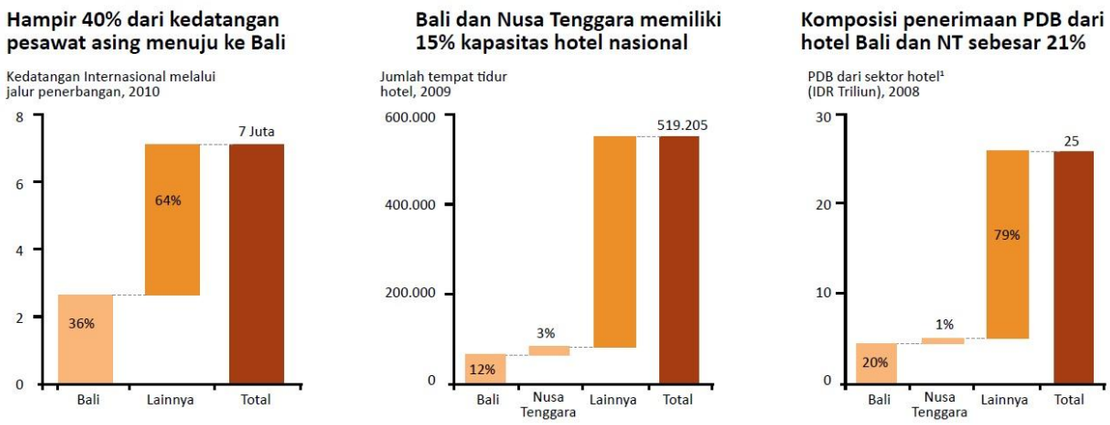

1. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Sumber: BPS

Dari perspektif nasional, Bali merupakan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama pariwisata di Indonesia. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2010, hampir 40 persen melalui Bali. Bandara Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama menerima lebih dari 2 juta pendatang setiap tahunnya. Selain itu, 15 persen kapasitas hotel di Indonesia serta 21 persen dari pendapatan perhotelan nasional berada di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara. Secara nasional, pariwisata menyerap sekitar 14 persen tenaga kerja pada tahun 2009 dengan jumlah lapangan kerja yang diciptakan sebesar 6,98 juta orang sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

Gambar 3.F.3
Kinerja Kepariwisataan Indonesia 2010

Kinerja Kepariwisataan Indonesia		
	DUNIA (2010)	INDONESIA (2010)
Jumlah Kunjungan Wisatawan Internasional (WISMAN)	935 juta	7 juta
Pertumbuhan Kunjungan dari Wisman	6,61%	10,74%
Pendapatan Pariwisata dari Wisman	USD 3.900 Miliar (2008)	USD 7,6 Miliar
Tenaga Kerja Pariwisata	238 juta Lapangan Kerja	6,98 juta Lapangan Kerja*

*berdasarkan data tahun 2009

Sumber: UNWTO dan NESPARNAS

Ke depannya, pariwisata masih menjadi kegiatan ekonomi utama yang akan dikembangkan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara karena masih banyaknya potensi pariwisata yang belum dioptimalkan saat ini. Pariwisata di koridor ini memiliki prospek sangat baik dengan Bali sebagai pusat pengembangan pariwisata yang didukung dengan potensi dan sumber daya alam serta budaya NTB dan NTT, yang antara lain ditandai dengan pengakuan internasional dari berbagai lembaga internasional seperti Pulau Wisata Terbaik di Dunia (2005) dari majalah TIME; Destinasi Eksotis Terbaik (2008) dari majalah *Luxury Travel Magazine*, London, Inggris; Pulau Wisata Asia Terbaik (2009) dari CEI Asia Magazine; Pulau Tujuan Wisata Terbaik di Asia Pasifik (2007, 2009,

2010) dan *Best Leisure DestinAsian* (2006, 2008) pada *The Fifth Annual DestinAsian Readers' Choice Awards*.

Selain itu sebagai pusat pertumbuhan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, Bali juga memiliki tingkat pertumbuhan pariwisata yang stabil dan ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat, yaitu sebesar 1.328.929 orang (2006), 1.741.925 orang (2007), 2.081.786 orang (2008), 2.384.819 orang (2009), 2.546.023 orang (2010), dengan rata-rata tingkat hunian hotel lebih dari 60 persen. Bali juga memiliki jalur penerbangan nasional ke berbagai destinasi Indonesia dan penerbangan internasional dari dan ke Bali dalam jumlah yang memadai sehingga Bali mempunyai kemampuan sebagai pintu gerbang sekaligus pusat distribusi pariwisata di Indonesia. Namun, masih ada tantangan pariwisata di Bali yang dapat dilihat dari ratarata belanja wisatawan/hari di Bali yang di bawah Thailand dan Maladewa serta menurunnya rata-rata lama kunjungan wisatawan di Bali seperti diperlihatkan di dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.F.4
Tantangan Pariwisata di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

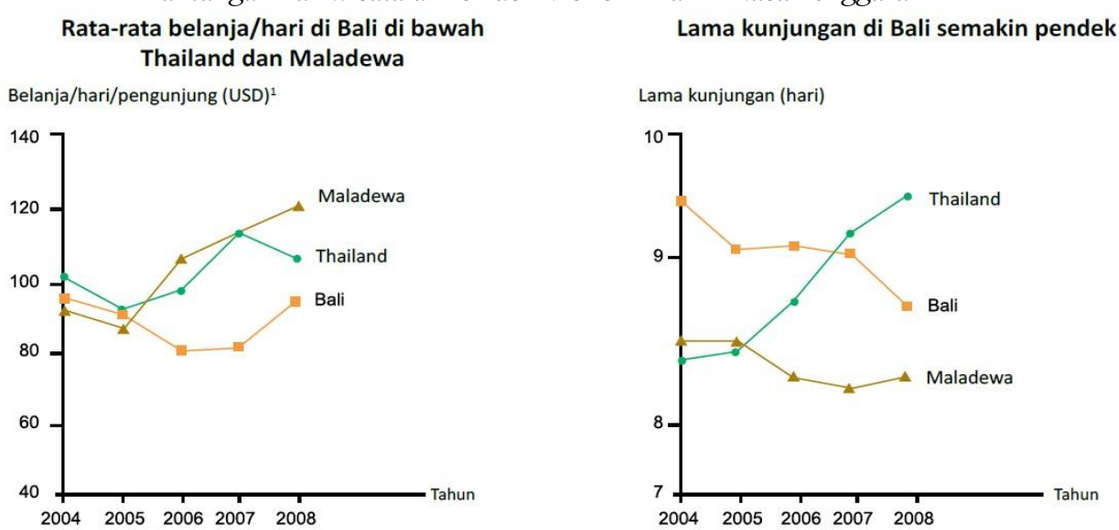

1. Hanya untuk wisatawan mancanegara, tidak termasuk tiket pesawat. Data menyesuaikan dengan inflasi dan fluktuasi nilai tukar.
Sumber: BPS; *Tourism Authority of Thailand; Maldives Monetary Authority*; EIU

Gambar 3.F.5
Data Pariwisata Bali –Nusa Tenggara terhadap Pariwisata Indonesia

DATA	Satuan	2009		2010	
		Bali – Nusa Tenggara	INDONESIA	Bali – Nusa Tenggara	INDONESIA
Jumlah Kunjungan Wisman *Direct*	Orang	2.436.409	6.323.730	2.597.889	7.002.944
		38,53%	100%	37%	100%
Rata-rata Pengeluaran Per Kunjungan	USD	1.353,26	995,93	1.581,84	1.085,75
		135,88%	100%	146%	100%
Rata-rata Pengeluaran Per Hari	USD	105,67	129,57	151,30	135,01
		82%	100%	112%	100%
Rata-rata Lama Tinggal	Hari	13,19	7,69	10,66	8,04
		172%	100%	133%	100%

Keterangan:
Data sementara tahun 2010 kunjungan wisman *direct* ke Bali – Nusa Tenggara melalui Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Padang Bai, Benoa, Bandara Selaparang dan Pelabuhan Benete, Bandara El Tari, lintas batas Atambua, Pelabuhan Maumere dan Kupang.
Sumber: P2DSJ Kemenbudpar dan BPS

Beberapa strategi umum untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan selama berkunjung ke Bali – Nusa Tenggara, antara lain:

a. Meningkatkan keamanan di dalam Koridor Bali – Nusa Tenggara, antara lain melalui penerapan sistem keamanan yang ketat;
b. Melakukan pemasaran dan promosi yang lebih fokus dengan target pasar yang lebih jelas. Strategi pemasaran untuk setiap negara asal wisatawan perlu disesuaikan dengan menerapkan tema "*Wonderful Indonesia, Wonderful Nature, Wonderful Culture, Wonderful People, Wonderful Culliner,*dan *Wonderful Price*". Kegiatan pemasaran dan promosi ini diharapkan dapat membuat Bali menjadi etalase pariwisata dan meningkatkan citra Bali sebagai tujuan utama pariwisata dunia;
c. Memberdayakan *Bali Tourism Board* untuk mengkoordinasikan usaha pemasaran dan promosi Bali;
d. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata di wilayah Bali Utara dalam rangka meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan dan lama tinggal wisatawan;
e. Meningkatkan destinasi pariwisata di luar Bali (*Bali and Beyond)* dengan menjadikan Bali sebagai pintu gerbang utama pariwisata Indonesia seperti wisata pantai (Bali, Lombok, NTT), wisata budaya (Bali), wisata pegunungan (Jatim, Bali, Lombok), dan wisata satwa langka (Pulau Komodo). Kunci sukses dari strategi ini adalah dengan pengadaan akses seperti peningkatan rute penerbangan ke daerah-daerah pariwisata di sekitar Bali, yang disertai pemasaran yang kuat dan terarah;
f. Meningkatkan kualitas dan kenyamanan tinggal para wisatawan dengan meningkatkan sarana dan prasarana seperti ketersediaan air bersih, listrik dan transportasi serta komunikasi;

g. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal terutama SDM pariwisata di NTB dan NTT, serta mengembangkan gerakan sadar wisata khususnya di wilayah Nusa Tenggara.

Gambar 3.F.6
Penciptaan Jaringan Klaster Pariwisata dengan Penambahan Rute Penerbangan

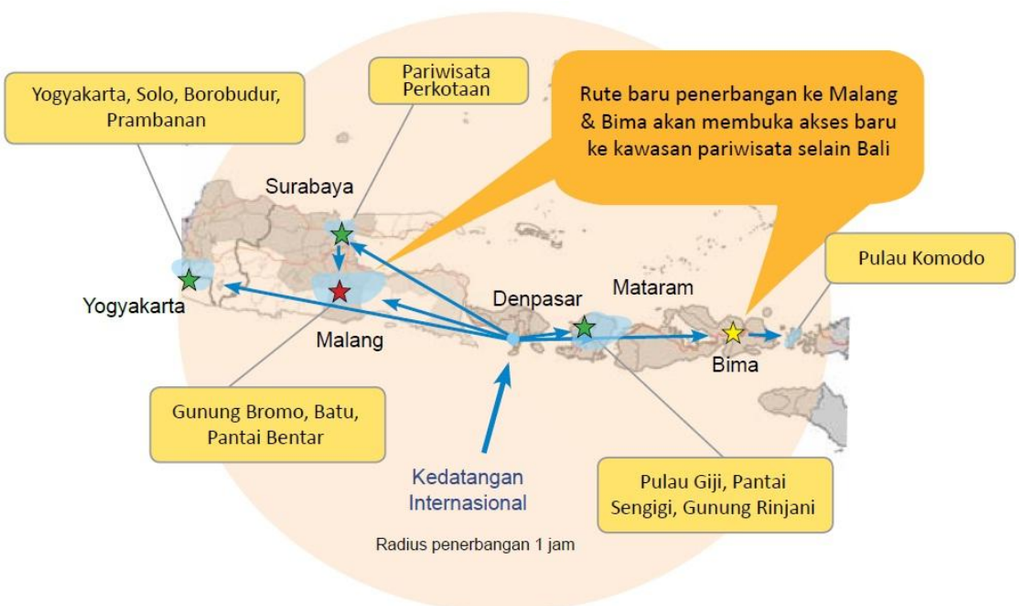

Selain meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, faktor lain untuk meningkatkan pendapatan kegiatan ekonomi utama ini adalah meningkatkan jumlah pembelanjaan wisatawan. Perubahan pola ekonomi dunia juga mempunyai dampak pada pariwisata daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan industri pariwisata harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengeksplorasi pasar-pasar baru yang bisa mendorong laju pertumbuhan pariwisata di masa mendatang.

Untuk meningkatkan citra kepariwisataan dan pengembangan kepariwisataan *up market* pada koridor ini adalah menjadikan Bali sebagai destinasi wisata utama MICE, *cruise* dan *yacht* serta Nusa Tenggara sebagai etalase wisata ekologis, petualangan, budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM.

Gambar 3.F.7
Pertumbuhan Pangsa Pasar Kapal Pesiar di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

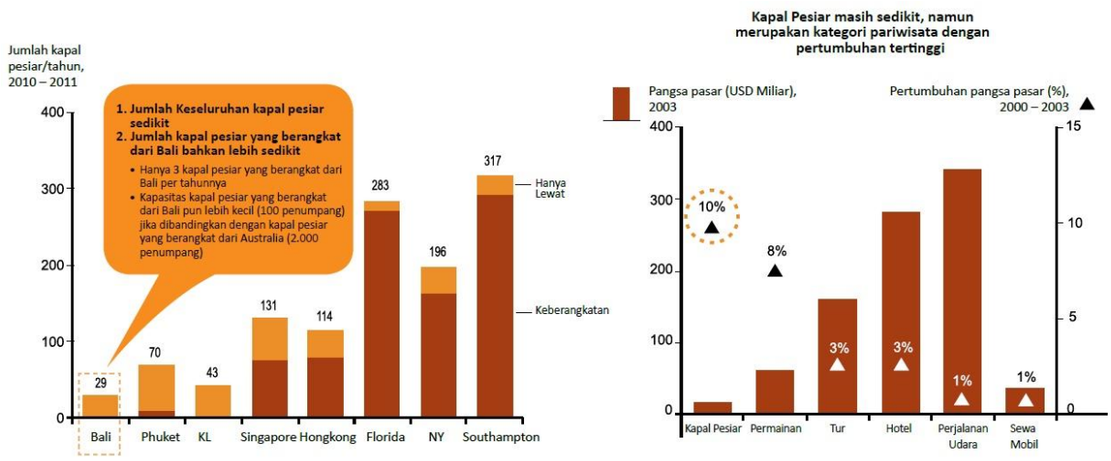

Sumber: Euromonitor; Mintel; analis ekuitas (Goldman, UBS); Airlines *Business Magazine; companies' 10-K, 6-K, annual reports*; analisis Tim

1) **Regulasi dan kebijakan**
   a) Kemudahan perluasan pemberian *Visa Entry*, *Visa On Arrival* dan *Visa On Board* bagi wisatawan mancanegara serta perpanjangan visa bagi pengguna kapal layar *yacht* asing;
   b) Pengembangan standar pembangunan terminal *cruise* dan marina sekaligus sebagai *port of entry;*
   c) Mempermudah pemberlakuan CAIT (*Clearance Approval for Indonesian Territory*) bagi wisatawan asing pengguna kapal layar *yacht;*
   d) Mengurangi/menghilangkan biaya impor sementara bagi pelaku asing wisata bahari (kapal layar *yacht*) yang masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia;
   e) Meninjau kembali RTRW Bali, NTB dan NTT untuk mendukung rencana pengembangan pariwisata di Bali;
   f) Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) percepatan perizinan dan penyediaan Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk semua perizinan untuk pengembangan kawasan wisata.

2) **Konektivitas (infrastruktur)**
   Selain hal di atas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama pariwisata, dilakukan melalui:
   a) Peningkatan kapasitas dan pelayanan bandar udara, seperti pengembangan bandar udara di Lombok yang dapat diberdayakan sebagai "matahari kembar" selain Bandara Ngurah Rai (untuk membagi beban lalu lintas penumpang yang ada di koridor ekonomi ini, karena jumlah pengunjung yang akan masuk ke koridor ini diproyeksikan akan melebihi kapasitas Bandar Udara Ngurah Rai pada tahun 2020);
   b) Peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur jalan, seperti rencana pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Benoa;
   c) Peningkatan akses jalan perlu ditingkatkan untuk menghubungkan daerah-daerah pariwisata di luar Bali bagian selatan dan di dalam wilayah NTB dan NTT;

d) Pembangunan Kereta Api Wisata Lingkar Bali (dalam rencana jangka panjang);
e) Peningkatan pelabuhan dan marina yang telah ada agar memenuhi standar (seperti kapal *cruise* dan kapal layar *yacht*);
f) Pembangunan pembangkit listrik baru yang dapat meningkatkan ketersediaan listrik bagi Bali dan Nusa Tenggara.

b. Perikanan

Kegiatan ekonomi utama perikanan merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dikembangkan guna menuju ketahanan pangan nasional. Saat ini produk perikanan merupakan sumber protein hewani dengan tingkat konsumsi terbesar di Indonesia dengan besaran konsumsi produk perikanan mencapai sebesar 30,4 kg/kapita/tahun yaitu 72 persen konsumsi protein hewani per kapita/tahun, dibandingkan sumber protein hewani lainnya seperti ayam, daging dan telur. Sebagai negara kepulauan, kondisi geografis Indonesia sangat mendukung pengembangan kegiatan perikanan. Indonesia memiliki akses sumber daya perikanan yang berlimpah baik perikanan perairan laut maupun air tawar dimana 76 persen luas permukaan Indonesia merupakan perairan laut. Selain itu, terdapat 5.500 sungai dan danau yang mengairi daratan Indonesia.

Gambar 3.F.8
Perkembangan Produksi Perikanan Indonesia Tahun 2009 – 2010

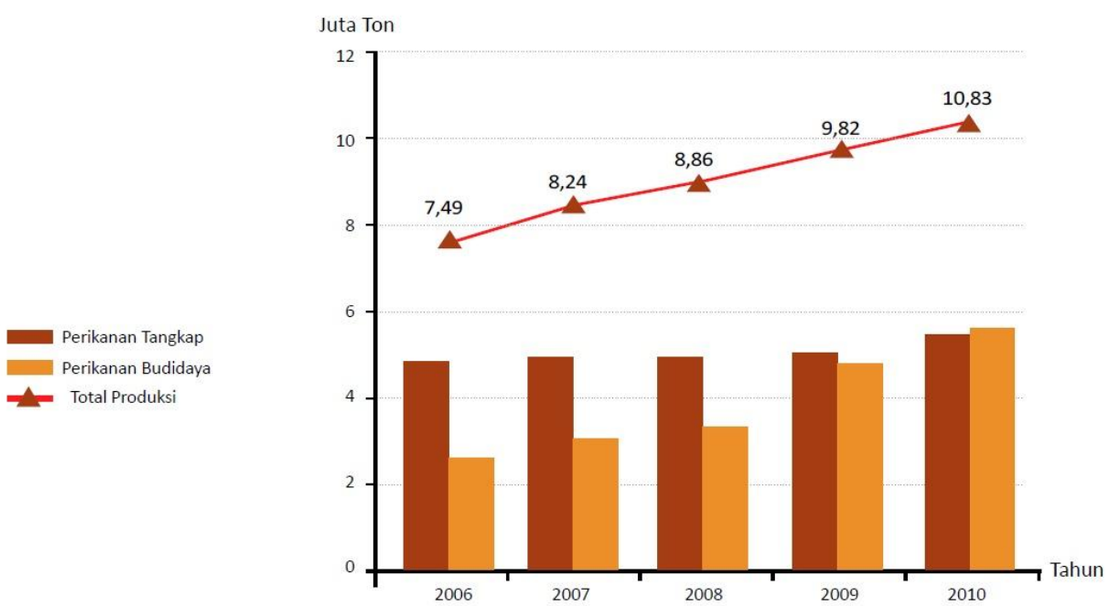

PRODUKSI PERIKANAN	Tahun		Kenaikan Rata-rata(%)
	2009	2010*)	
Perikanan Tangkap	**5.107.971**	**5.348.440**	**4,71**
Perikanan Laut	4.812.235	4.846.880	0,72
Perikanan Umum	295.736	501.560	69,60
Perikanan Budidaya	**4.708.563**	**5.478.062**	**16,34**
Budidaya Laut	2.820.083	3.385.552	20,05
Tambak	907.123	990.403	9,18
Kolam	554.067	627.643	13,28
Karamba	101.771	117.860	15,81
Jaring Apung	238.606	272.705	14,29
Sawah	86.913	83.900	-3,47
Total	**9.816.534**	**10.826.502**	**10,29**

Sumber: Paparan AP5I pada saat Penjaringan Aspirasi Sektor, 8-9 Februari 2011

Secara umum kegiatan perikanan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perkembangan kegiatan perikanan di Indonesia memiliki kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,29 persen. Pada periode 2009 – 2010, produksi perikanan budidaya meningkat 16,34 persen dengan produksi terbesar diperoleh dari budidaya di laut. Peningkatan ini lebih tinggi dari produksi perikanan tangkap yang meningkat 4,71 persen.

Kegiatan perikanan juga mencakup produk kelautan, misalnya seperti rumput laut dan garam. Produksi rumput laut nasional pada tahun 2010 mencapai 3 juta ton. Di dalam koridor ini juga terdapat 12 kabupaten yang menjadi lokasi untuk pengembangan komoditas unggulan rumput laut sebagaimana tercantum dalam program Minapolitan 2010 – 2014.

Lain halnya dengan produksi garam. Terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang potensial untuk pengembangan produksi garam, saat ini Indonesia harus melakukan impor garam guna memenuhi kebutuhan domestik. Pada tahun 2009 – 2010, impor garam untuk konsumsi masyarakat Indonesia meningkat tajam sebesar 500 persen. Peningkatan besaran impor garam dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.F.9
Perkembangan Impor Garam Indonesia Tahun 2008 – 2010

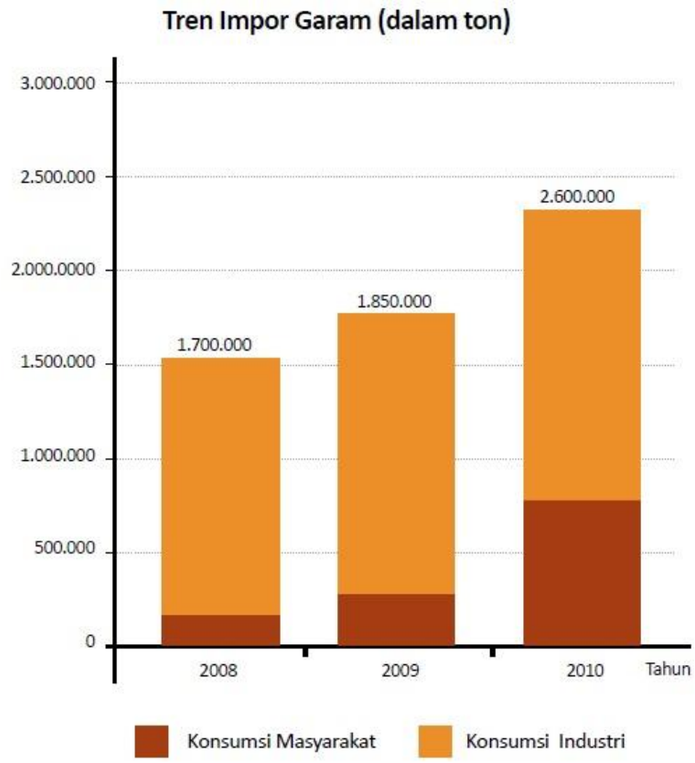

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2010

Sehubungan dengan hal ini pemerintah tengah menerapkan usaha untuk meningkatkan produksi garam dengan membentuk kawasan minapolitan garam. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada NTT sebagai wilayah pengembangan komoditi ini, karena wilayah ini memiliki lahan potensial produksi garam yang luas.

Bagi Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, kegiatan ekonomi utama perikanan saat ini menyumbang 13,2 persen PDRB dari sektor agrikultur pangan. Menurut data dari Pusat Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor (IPB), saat ini kegiatan ekonomi utama perikanan hanya menggunakan kurang dari 25 persen potensi kelautan di Indonesia. Peningkatan produktivitas hasil kelautan dapat dikembangkan bukan hanya melalui penangkapan, tetapi juga melalui pengembangan budidaya. Potensi yang besar tersebut terutama terdapat di daerah NTB. Kegiatan ekonomi utama perikanan perlu dikembangkan karena kegiatan tersebut berpotensi menjadi mesin penggerak perekonomian Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara melalui eksternalitas yang besar yang dimiliki dalam penyediaan lapangan kerja.

Gambar 3.F.10
Kegiatan Perikanan Memiki Potensi Besar di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

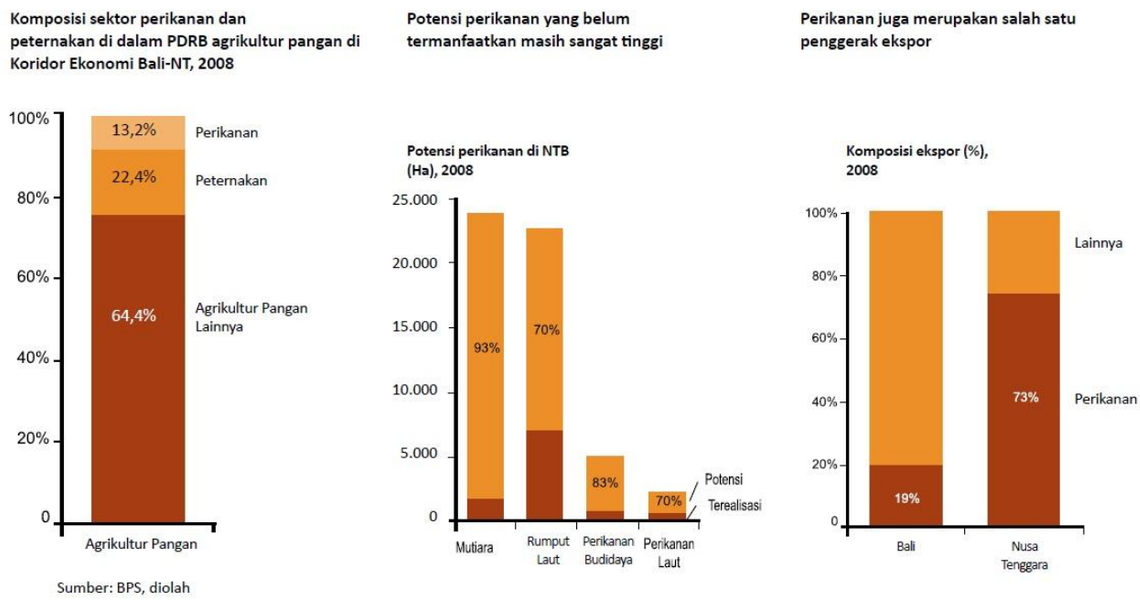

Sumber: BPS, diolah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kegiatan perikanan dibagi menjadi tiga aspek utama yaitu penangkapan/budidaya, pengolahan dan distribusi hasil pengolahan perikanan. Terdapat beberapa tantangan yang berkaitan dengan tiga aspek pengembangan kegiatan perikanan di atas, antara lain:

a. Tidak terpetakannya potensi perikanan kelautan secara akurat serta lemahnya kontrol implementasi rencana tata ruang yang menyebabkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. Terbatasnya suplai perikanan laut sehingga membutuhkan efisiensi produksi melalui pengembangan bibit unggul perikanan;
c. Sebagian besar armada dan peralatan penangkapan ikan masih sangat sederhana;
d. Rendahnya minat investor untuk pengembangan perikanan, terutama dalam kegiatan pengolahan produk perikanan dan kelautan;
e. Rendahnya nilai tambah ekonomis produk olahan perikanan kelautan;
f. Rendahnya kualitas SDM perikanan dan kelautan, baik dalam produksi penangkapan dan budidaya perikanan serta dalam pengolahannya;
g. Terbatasnya permodalan untuk masyarakat setempat sehubungan dengan pengembangan kegiatan perikanan berbasis masyarakat;
h. Terbatasnya jalur distribusi dan pemasaran produk perikanan dan olahannya;
i. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung (antara lain jalan, air bersih dan listrik) terutama untuk melayani industri pengolahan produk perikanan kelautan. Hal ini menyebabkan tingginya biaya produksi perikanan dan produk olahannya;
j. Minimnya akses yang menghubungkan antara lokasi-lokasi penghasil produk perikanan kelautan dengan lokasi industri pengolahannya serta dengan pasar regional dan fasilitas ekspor.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi umum dan langkah aksi yang akan dikembangkan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara adalah:

a. Meningkatan produksi hasil perikanan, yang meliputi penangkapan tuna,budidaya udang, dan budidaya rumput laut. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki potensi perikanan yang sangat besar, oleh karena itu untuk meningkatkan produksi perikanan perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi:
   1) Pemetaan potensi sumber daya perikanan dan kelautan;
   2) Pengawasan penerapan RTRW;
   3) Pembentukan pusat benih;
   4) Revitalisasi tambak yang sudah ada;
   5) Pendirian pusat pelatihan nelayan dan pengadaan program sertifikasi;
   6) Pengembangan bibit unggul dan teknologi penangkapan ikan.

b. Meningkatan produksi produk olahan bernilai tambah tinggi hasil perikanan, yang meliputi pembekuan udang, pengalengan ikan, pengolahan tepung ikan, dan pengolahan keraginan (tepung rumput laut). Nilai tambah produk olahan perikanan pada saat ini masih sangat kecil. Peningkatan nilai tambah ekonomis produk olahan perikanan dapat dilakukan dengan:
   1) Pengembangan klaster industri perikanan yang melingkupi industri produksi bahan baku;
   2) Penjalinan kerjasama dengan negara yang mengkonsumsi hasil perikanan dan kelautan (Jepang dan Thailand) untuk pemasaran hasil budidaya;
   3) Pemberian pendampingan pada UKM perikanan untuk meningkatkan pengetahuan pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi serta pemberian skema *micro credit* PNPM Mandiri melalui koperasi nelayan.

c. Meningkatkan produksi garam dengan mengoptimalkan lahan yang memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan usaha garam. Pengembangan industri garam merupakan kegiatan prioritas saat ini karena Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan domestik dan masih mengandalkan impor garam. Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri, sentra garam akan dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1) **Regulasi dan Kebijakan**

   Dalam rangka melaksanakan strategi umum peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan sebagai berikut:
   a) Penyiapan dan pengawasan pelaksanaan RTRW;
   b) Penjalinan kerjasama dengan negara yang mengkonsumsi hasil perikanan dan kelautan (Jepang dan Thailand) untuk pemasaran hasil budidaya;
   c) Penjalinan kerjasama antara industri garam dengan pembudidaya garam setempat dalam penyediaan bahan baku industri garam.

2) **Konektivitas (infrastruktur)**

   Selain hal di atas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas untuk mendukung peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam, dilakukan melalui:
   a) Perbaikan *level of service* jalan lintas kabupaten, terutama untuk wilayah NTT dan peningkatan akses dari dari dermaga pendaratan ikan ke jalan lintas kabupaten terdekat;
   b) Peninjauan kembali kapasitas pelabuhan setempat guna mendukung aktivitas industri;
   c) Percepatan program penambahan kapasitas energi listrik dengan peningkatan kapasitas PLTU/PLTP;

d) Pengembangan Bandar Udara Mbai di Kabupaten Nagekeo, NTT yang digunakan untuk mengangkut hasil perikanan dan kelautan yang bernilai tinggi namun harus cepat dikonsumsi;
e) Percepatan pembangunan instalasi pengolahan air bersih terutama di wilayah NTT untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

3) SDM dan IPTEK

Upaya peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam, dilakukan melalui:
a) Pendirian pusat pelatihan nelayan dan pengadaan program sertifikasi;
b) Pengembangan bibit unggul dan teknologi penangkapan ikan;
c) Pemberian pendampingan pada UKM perikanan untuk meningkatkan pengetahuan pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi serta pemberian skema *micro credit* PNPM Mandiri melalui koperasi nelayan;
d) Penjalinan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Universitas setempat untuk pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang bernilai jual lebih tinggi (kualitas lebih baik);
e) Penjalinan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Universitas setempat untuk pengembangan teknologi budidaya garam (agar tidak tergantung pada cuaca);
f) Pendirian pusat pelatihan budidaya garam dengan skala layanan kabupaten untuk diseminasi teknik dan kemungkinan integrasi penggunaan lahan tambak garam dengan budidaya perikanan.

c. Peternakan

Kegiatan ekonomi utama peternakan berkontribusi terhadap PDRB sekitar 16 persen dari sektor agrikultur pangan untuk Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara. Sebagian besar populasi ternak di koridor ini masih dikonsumsi secara lokal dan hanya dipasarkan ke provinsi lain dalam jumlah sedikit.

Gambar 3.F.11
Hasil Kegiatan Peternakan Sebagian Besar Masih Dikonsumsi Secara Lokal

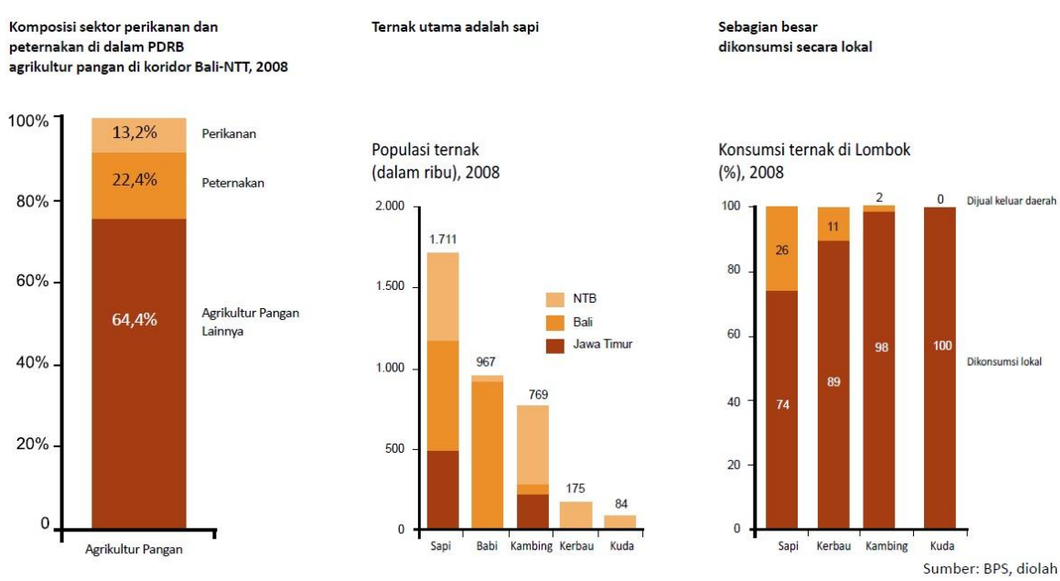

Jenis populasi ternak yang paling potensial dikembangkan di koridor ini adalah Sapi Bali yang sudah dikenal luas sebagai sapi potong asli Indonesia. Sapi potong dapat dikembangkan untuk menghasilkan tujuh jenis emas, yaitu emas merah (daging), emas putih (susu), emas putih batangan (tulang), emas kuning (urin), emas cokelat (kulit), emas biru dan emas hijau (kotoran). Urin sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sedangkan kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan energi biogas.

Gambar 3.F.12
Pertumbuhan Populasi dan Produksi Ternak Sapi Potong di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

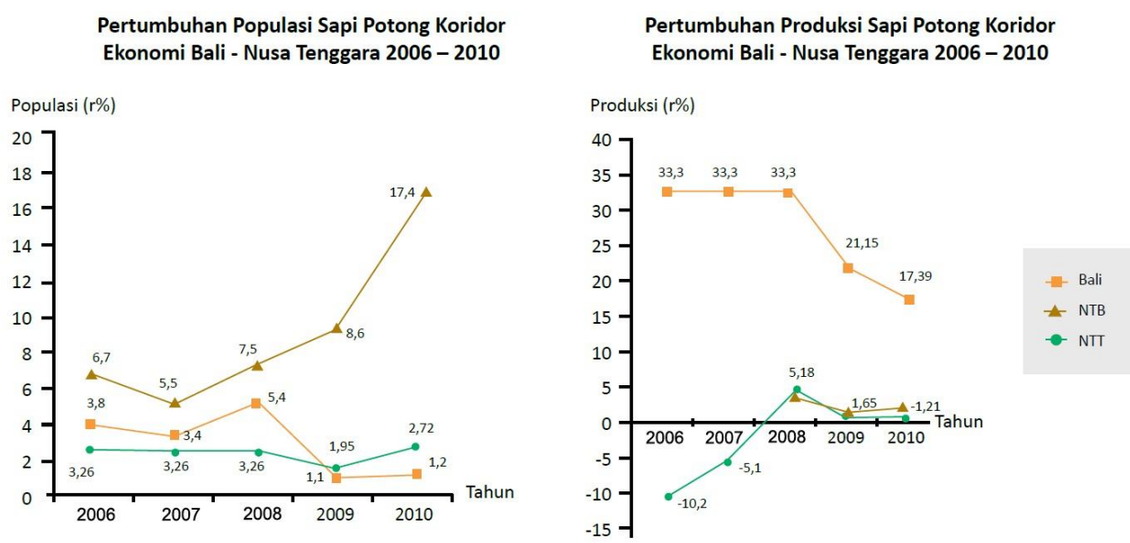

Sumber: Paparan Gugus Tugas Bali Nusa Tenggara Direktorat Jendral Peternakan, Kementerian Pertanian, 2011

Pertumbuhan populasi ternak sapi potong di Nusa Tenggara Barat cukup pesat dari tahun 2009 hingga tahun 2010, namun hal yang serupa tidak terjadi di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, pertumbuhan produksi sapi potong di Bali dan Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan di tahun 2008 dimana Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan produksi ini diakibatkan maraknya pemotongan sapi betina produktif, penyelundupan sapi, maupun penurunan kualitas bibit sapi itu sendiri. Selain itu, tantangan terbesar dalam pengembangan kegiatan peternakan juga meliputi terbatasnya infrastruktur yang dapat mendukung distribusi produk ternak sapi, kurangnya modal usaha dan lemahnya sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.

Saat ini terdapat sentra pemurnian dan pembibitan Sapi Bali di tiap provinsi yang umumnya dikelola secara individual. Dengan tingginya jumlah rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan peternakan, diharapkan pengembangan kegiatan peternakan ini akan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara ke depannya.

1) **Regulasi dan Kebijakan**

Dalam rangka melaksanakan strategi pengembangan kegiatan ekonomi utama peternakan, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan sebagai berikut:

a) Meningkatakan industri hilir dengan meningkatkan nilai tambah ternak sapi potong, yang dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi produk yang memanfaatkan kulit, tulang, darah, kotoran, dan urin melalui penguatan industri kecil;
b) Memberikan perlindungan usaha ternak dengan kebijakan pengurangan impor daging secara bertahap dan kebijakan pengendalian harga daging yang atraktif dan terjangkau;
c) Menyediakan daging dengan kualitas ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal);
d) Mengembangkan kebijakan usaha tani sapi-tanaman yang terintegrasi *(integrated rice-livestock system* dan berkelanjutan dengan mengoptimalisasi prinsip *Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA),* atau pendekatan *zero waste* yang menghasilkan produk 4F (*Food, Feed, Fertilizer & Fuel)*;
e) Memberikan jaminan tata ruang untuk lahan peternakan dan lahan penggembalaan ternak;
f) Mempermudah akses finansial bagi peternak melalui penguatan koperasi simpan pinjam;
g) Memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang terbukti melakukan pemotongan sapi betina produktif.

Gambar 3.F.13
Strategi Percepatan Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

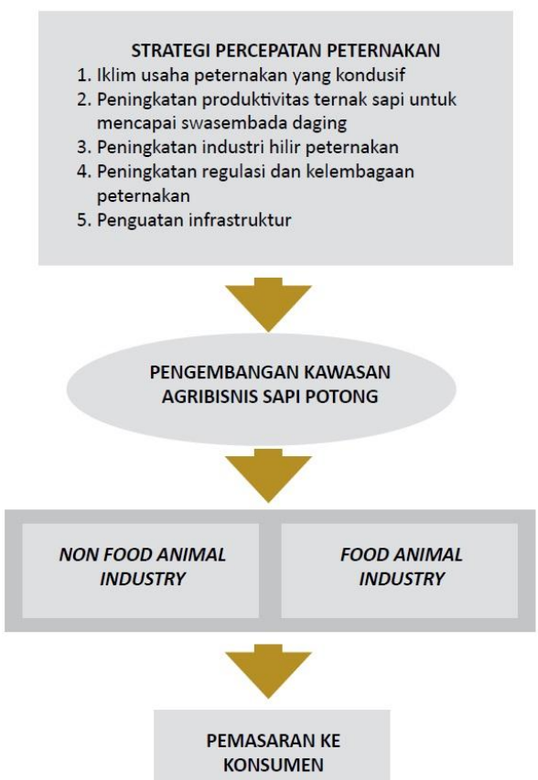

Sumber: Paparan Gugus Tugas Bali Nusa Tenggara Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian, 2011, diolah.

2) Konektivitas (infrastruktur)

Hal lain adalah, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas untuk mendukung produksi peternakan, yang dilakukan melalui:

a) Penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan peternakan melalui PPP;
b) Penguatan jalan untuk mengangkut produk peternakan dari sentra industri pengolahan daging dan non daging ke pelabuhan lokal terdekat;
c) Penguatan pelabuhan lokal terdekat untuk mengangkut dan memasarkan produk ternak sapi ke wilayah lain terutama Jakarta dan Surabaya. Pelabuhan laut Marapokot di Kabupaten Nagekeo akan dikembangkan untuk mendistribusikan hasil peternakan dan perikanan;
d) Penguatan Bandar Udara Mbai atau dikenal dengan nama Bandara Surabaya II yang akan difungsikan untuk mengangkut produk peternakan dan perikanan;
e) Pembangunan pembangkit listrik baru yang dapat meningkatkan ketersediaan listrik khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara;
f) Penyediaan air bersih untuk menjamin ketersediaan pakan ternak terutama pada musim kemarau khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara.

3) SDM dan IPTEK

Upaya peningkatan produksi dan pengembangan peternakan dilakukan melalui:

1) Menjamin ketersediaan pakan sepanjang tahun dengan teknologi pakan murah untuk pemenuhan kebutuhan daging lokal dari produksi dalam negeri;
2) Mengadakan pelatihan dan pendampingan kelompok peternak dalam rangka penerapan program *Good Breeding Practice;*
3) Mengembangkan teknologi untuk perbaikan mutu bakalan melalui metode inseminasi buatan, embrio transfer atau rekayasa genetika dalam waktu panjang.
4) Pengembangan kegiatan ekonomi utama peternakan di Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara akan difokuskan pada pengembangan kawasan agribisnis dengan industri utama pengolahan daging sapi *(food animal industry)* dan industri pendukung yaitu industri tepung tulang, kulit, pupuk organik dan biogas *(non food animal industry)*. Produk peternakan tidak hanya dikonsumsi secara lokal, namun didistribusikan ke konsumen di wilayah lain.

d. Kegiatan Ekonomi Lain

Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara di atas, di koridor ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti tembaga. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat juga berkontribusi di dalam pengembangan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara secara menyeluruh.

2. Investasi

Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan ekonomi utama Pariwisata, Perikanan, Peternakan serta infrastruktur pendukung sebesar sekitar IDR 133 Triliun. Berikut ini adalah gambaran umum investasi yang ada di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara:

Gambar 3.F.14
Nilai Investasi di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

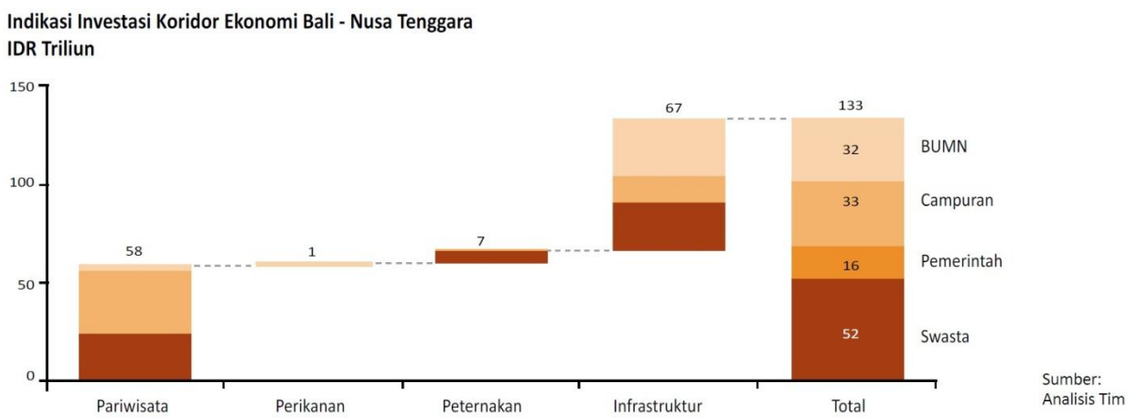

Inisiatif investasi yang berhasil teridentifikasi tersebut dihimpun dari dana pemerintah, swasta dan BUMN serta campuran dari ketiganya.

Di samping investasi di atas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan ekonomi utama di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama yaitu tembaga dan migas dengan jumlah investasi sebesar IDR 34,9 Triliun. Selain itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan di MP3EI seperti emas dan sektor lainnya sebesar IDR 42 Triliun.

3. Inisiatif Strategis Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara

Gambar 3.F.15
Peta Investasi Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

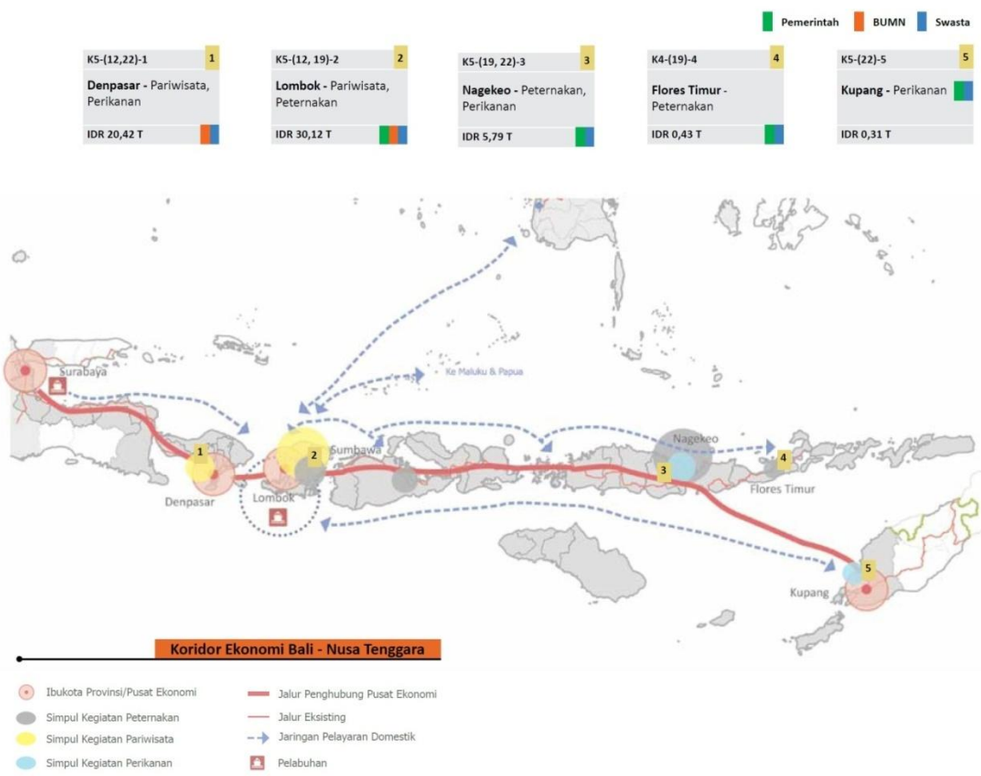

Gambar 3.F.16
Aglomerasi Indikasi Investasi

No	Nama Kode	Lokus	Kegiatan Ekonomi Utama	Pelaku	Infrastruktur Pendukung	Jumlah Investasi (IDR Triliun)	*Share* Investasi terhadap Kegiatan Ekonomi Utama di seluruh Koridor (%)
1	K5-(12,22)-1	Jimbaran, Bangli, Buleleng	Pariwisata	BUMN, Swasta	Pelabuhan, Jalan Tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Benoa	20,34	35
		Badung	Perikanan	BUMN	Fasilitas Produksi	0,08	0,2
2	K5-(12,19)-2	Lombok	Pariwisata	BUMN, Swasta	Bandara	30,00	51
		Bima	Peternakan	Pemerintah	Jalan, Pelabuhan	0,12	2
3	K5-(19,22)-3	Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur	Peternakan	Swasta	Jalan, Pelabuhan, Bandara	5,30	77
		Nagekeo, Ende	Perikanan	Pemerintah, Swasta	Jalan, Pelabuhan	0,49	1
4	K5-(19)-4	Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Timor Tengah Utara	Peternakan	Pemerintah, Swasta	Pelabuhan, Jalan	0,43	6
5	K5-(22)-5	Kupang	Perikanan	Pemerintah, Swasta	Jalan, Pelabuhan	0,31	1

Sumber:
Data Olahan Tim

Di samping investasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi utama diatas, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara. Berikut ini adalah nilai indikasi investasi infrastruktur untuk masing-masing tipe infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintah, BUMN dan campuran:

Gambar 3.F.17
Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN, dan Campuran

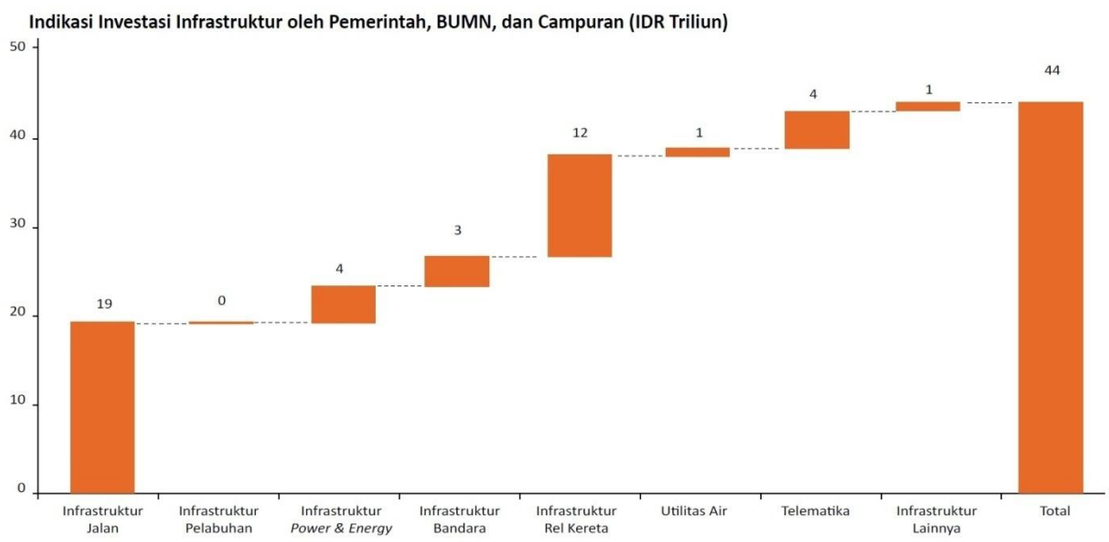

Dalam jangka panjang, kegiatan kepariwisataan di koridor ini merupakan pendorong pembangunan ekonomi di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara melalui diversifikasi produk wisata, perluasan kawasan pariwisata dan pengembangan daya saing destinasi pariwisata secara berkelanjutan, maupun pengembangan pangsa pasar dengan daya beli tinggi. Pengembangan destinasi pariwisata dalam koridor ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur sepanjang Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara.

Pengembangan kegiatan peternakan secara konsisten akan diupayakan melalui pengembangan teknologi mutakhir untuk meningkatkan kualitas bibit sapi, pengintegrasian kegiatan peternakan dan tanaman pangan untuk menjamin sumber pakan ternak, pengembangan industri pengolahan daging dan non-daging (industri kulit, industri tulang, industri biogas, dan industri pupuk organik), dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan pelabuhan laut untuk mendistribusikan hasil produksi peternakan.
Pengembangan produktivitas perikanan laut memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan populasi ikan melalui penjalinan kerjasama untuk pengembangan bibit unggul dan teknologi perikanan tangkap dan budidaya serta teknologi pengolahan produk perikanan. Selain itu pengembangan infrastruktur dan fasilitas penunjang sangat penting dalam pengembangan kegiatan perikanan. Kegiatan hilir peternakan dan perikanan, seperti pengolahan daging dan pengalengan ikan maupun industri makanan lainnya, secara konsisten akan didukung pemerintah melalui penyediaan infrastruktur fisik maupun insentif/disinsentif dan deregulasi agar membangun iklim usaha yang kondusif.

Struktur tata ruang Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara dikembangkan dengan menitikberatkan pada konektivitas darat, laut dan udara yang menghubungkan baik antar pulau maupun antar provinsi dengan mempertimbangkan kondisi geografis koridor ini yang berupa gugus pulau. Sistem konektivitas ini akan mendukung seluruh kegiatan ekonomi utama (pariwisata, peternakan, dan perikanan) dan

kegiatan lainnya yang memiliki nilai investasi tinggi seperti migas, emas dan tembaga. Namun perlu diperhatikan bahwa eksplorasi pertambangan tidak diprioritaskan pada koridor ini karena akan memberikan dampak negatif pada kegiatan pariwisata, perikanan, dan peternakan. Prioritas peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan udara diberikan pada pelabuhan yang telah ada dan berdekatan dengan lokus kegiatan ekonomi utama agar lebih efektif, efisien dan meminimalkan biaya transportasi. Selain itu, rencana tata ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten harus mampu mengakomodasi dan menjamin ketersediaan lahan untuk kegiatan pariwisata, perikanan, dan peternakan terutama untuk lahan penggembalaan, efektif, efisien dan meminimalkan biaya transportasi. Selain itu, rencana tata ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten harus mampu mengakomodasi dan menjamin ketersediaan lahan untuk kegiatan pariwisata, perikanan, dan peternakan terutama untuk lahan penggembalaan.